

## **FRAUD CONTROL REINVENTED:**

Integrasi  
ISO 37001, ISO 37301, dan  
ISO 37003 untuk  
Membangun Sistem  
Antifraud yang  
Tangguh



## About ISO Center Indonesia

ISO CENTER INDONESIA adalah penyedia layanan terkait ISO dan Sistem Manajemen yang komprehensif. Kami adalah The Ultimate ISO and Management System Resources yang siap meningkatkan kinerja organisasi Anda melalui penyediaan informasi, pelatihan, implementasi, dan asesmen standar internasional berbasis ISO dan sistem manajemen yang efektif, efisien, out of the box, dan menggunakan metode terkini yang di-enable oleh teknologi dan AI. Jangan lupa untuk selalu kunjungi situs kami dan mengakses tautan Articles yang memuat kajian-kajian terkini kami dan Download yang berisi video-video pembelajaran, e-book hasil riset kami, dan alat-alat bantu yang berupa kertas-kertas kerja dan template yang selalu kami kinikan.

Semua itu kami persembahkan untuk Anda!

# Disclaimer



- Sesi ini tidak menjelaskan apa itu **ISO 37001 (ABMS - Anti-Bribery Management System)**, **ISO 37301 (CMS- Compliance Management System)**, dan **ISO 37003 (FCMS - Fraud Control Management System)**.
- Integrasi ini dirancang berdasarkan prinsip *High-Level Structure of ISO based Management System Standard (HLS)*.
- Integrasi ini bersifat konseptual yang diturunkan dari ketiga standar ISO ini, organisasi mungkin memiliki kewajiban kepatuhan tersendiri yang cukup berbeda, dan harus diadopsi juga (mis: untuk Lembaga Jasa Keuangan berbasis POJK no 12 tahun 2024).

# Mengenal ISO/TC 309 – Komite Teknis ISO yang Menyusun Ketiga ISO Ini

## Siapa kami?

ISO/TC 309 *Governance of Organizations* didirikan pada September 2016 untuk menangani “**standardisasi di bidang tata kelola (*governance*) organisasi.**”

## Apa yang ingin kami capai?

Perubahan dalam lingkungan organisasi global, serta dalam ekspektasi masyarakat luas, telah menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman internasional mengenai seperti apa tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) seharusnya. Perubahan kontekstual ini terjadi di tingkat global, sehingga pemahaman tersebut memerlukan perspektif berbasis konsensus global. Selain itu, semakin diakui bahwa “**tata kelola (*governance*)” berbeda dengan “manajemen (*management*)”.**

ISO/TC 309 akan menghasilkan *deliverables* yang berkaitan dengan **tata kelola**, dalam arti mengarahkan organisasi, **serta keluaran yang berkaitan dengan alat untuk mengendalikan organisasi seperti program pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), kepatuhan (*compliance*), dan anti-penyuapan (*anti-bribery*).**

Dengan demikian, komite teknis (TC) ini akan menghasilkan *International Standards* yang relevan secara global dan dapat digunakan di mana saja, yang mencakup:

- Tata kelola dan sistem tata kelola; dan
- Manajemen dan sistem manajemen.



ISO/TC 309

Governance of organizations

# Standar-Standar Terbitan ISO/TC 309

1. **Anti-bribery management systems (ABMS)** — Requirements with guidance for use - ISO 37001, published on 14 October 2016 (second edition published in February 2025).
2. **Whistleblowing management systems (WMS)** — Guidelines - ISO 37002, published on 27 July 2021
3. **Compliance management systems (CMS)** — Requirements with guidance for use - ISO 37301, published on 13 April 2021
4. **Fraud Control management systems (FCMS)** — Guidelines - ISO 37003, published in May 2025.
5. **Governance of organizations** — Guidance - ISO 37000 , published on 14 September 2021
6. **Internal investigations of organizations** — Guidance - ISO 37008, published on 28 July 2023
7. **Governance of organizations** — Governance maturity model — Guidance - ISO 37004, published on 3 November 2023
8. **Governance of organizations** — Developing indicators for effective governance - ISO 37005:2024, published on 31 July 2024
9. **Conflict of interest in organizations** — Guidance - ISO 37009, published on 11 september 2025

Alasan	Penjelasan
<b>Simplifikasi Manajemen</b>	Ketiga sistem manajemen ini (Kepatuhan, Anti-Suap, dan Kontrol Kecurangan) dibangun berdasarkan <b>struktur standar yang harmonis</b> (High-Level Structure/HLS) yang memang memfasilitasi penggabungan menjadi <b>satu sistem manajemen terintegrasi</b> .
<b>Mitigasi Risiko Komprehensif</b>	Sistem manajemen yang terintegrasi membantu organisasi menerapkan langkah-langkah yang memadai dan proporsional yang dirancang untuk <b>mencegah, mendeteksi, dan merespons</b> terhadap suap dan pelanggaran secara umum. Hal ini membantu menghindari atau <b>mengurangi biaya, risiko, dan kerusakan</b> reputasi akibat keterlibatan dalam pelanggaran.
<b>Konsistensi Kebijakan dan Budaya</b>	Kebijakan Anti-Suap harus menjadi <b>komponen dari kebijakan kepatuhan yang terintegrasi</b> , untuk memastikan bahwa badan pengatur dan manajemen puncak mempromosikan <b>budaya integritas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan</b> yang aktif, terlihat, konsisten, dan berkelanjutan di seluruh organisasi.

Alasan	Penjelasan
<b>Pengurangan Duplikasi dan Biaya</b>	Integrasi memungkinkan organisasi untuk <b>menggunakan sumber daya yang sama</b> dan menyimpan informasi terdokumentasi (dokumented information) sebagai bagian dari satu sistem, seperti sistem kepatuhan, keuangan, atau audit yang dapat mengurangi biaya dan duplikasi dalam pelatihan, audit internal, dan dokumentasi.
<b>Penguatan Kontrol Bersama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrol yang dirancang untuk mengatasi risiko suap (seperti <b>kontrol keuangan</b> dan <b>non-keuangan</b>) seringkali adalah kontrol yang sama yang efektif untuk mencegah kecurangan.</li> <li>- Mengelola <b>konflik kepentingan</b> dalam satu prosedur juga membantu mengatasi risiko suap dan kecurangan secara simultan.</li> </ul>
<b>Evaluasi Kinerja Menyeluruh</b>	Audit internal, peninjauan manajemen, dan prosedur tindakan korektif dapat dilakukan secara terpadu untuk memverifikasi kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen secara <b>keseluruhan</b> , menjamin <b>peningkatan berkelanjutan</b> .

## Klausul HLS

## Konteks

### 4. Context of the organization

Menentukan isu **internal dan eksternal** yang relevan (4.1).

Memahami **kebutuhan dan ekspektasi pihak berkepentingan** (4.2).

Menetapkan **ruang lingkup** sistem manajemen (4.3).

**Menetapkan, mengimplementasikan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen**, termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya (4.4).

Melakukan **penilaian risiko** sebagai dasar sistem manajemen (4.5/4.6).

### 5. Leadership

Mendemonstrasikan **Kepemimpinan dan Komitmen** yang aktif dan terlihat oleh manajemen puncak (dan dewan pengarah) (5.1).

Menetapkan **Kebijakan** sistem manajemen (5.2).

Menetapkan **wewenang dan tanggung jawab** dalam penerapan sistem manajemen (5.3).

## Klausul HLS

## Konteks

### 6. Planning

Merencanakan tindakan untuk mengatasi **risiko dan peluang** (6.1).

Menetapkan **Tujuan** sistem manajemen yang terukur dan konsisten dengan kebijakan (6.2).

Melaksanakan **Perencanaan Perubahan** pada sistem manajemen secara terencana (6.3).

### 7. Support

Menentukan dan menyediakan **Sumber Daya** yang dibutuhkan (7.1).

Menentukan **Kompetensi** yang diperlukan dan mengambil tindakan untuk mencapainya (7.2).

Memberikan **Kesadaran dan Pelatihan** yang memadai kepada personel (7.3).

Menetapkan proses **Komunikasi** internal dan eksternal (7.4).

Mengontrol **Informasi Terdokumentasi** (7.5).

## Klausul HLS

## Konteks

### 8. Operation

Melaksanakan **Perencanaan Kontrol Operasional Spesifik**, termasuk kontrol proses yang disediakan secara eksternal (8.1).  
Menerapkan **Kontrol Operasional Spesifik** (8.2-8.X).

### 9. Performance evaluation

Melakukan **Monitoring, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi** sistem manajemen (9.1).  
Melakukan **Audit Internal** pada interval yang direncanakan untuk memverifikasi kesesuaian dan efektivitas (9.2).  
**Kajian Manajemen** oleh manajemen puncak (dan dewan pengarah) untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas berkelanjutan (9.3-9.4).

### 10. Improvement

Melaksanakan **Peningkatan Berkelanjutan** (10.1) terhadap kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen.  
Mengambil **Tindakan Korektif** (10.2) untuk menghilangkan akar penyebab nonkonformitas dan mencegah terulang.

**4. Konteks Organisasi**  
(4.1–4.5)

- 1) Penilaian Risiko Terpadu:** Melakukan **Penilaian Risiko Kepatuhan (Compliance Risk Assessment)** tunggal yang mencakup identifikasi, analisis, dan prioritas semua risiko kepatuhan, termasuk risiko suap (Bribery Risk Assessment) dan risiko kecurangan (Fraud Risk Assessment).
- 2) Ruang Lingkup Menyeluruh:** Memastikan ruang lingkup sistem mencakup ketiga domain risiko tersebut (Kepatuhan, Suap, dan Kecurangan).

**5. Kepemimpinan**  
(5.1–5.3)

- 1) Kepemimpinan Terpusat dan Budaya Integritas:** Top manajemen harus menunjukkan komitmen aktif, terlihat, dan konsisten (active, visible, consistent commitment) terhadap budaya **Anti-Suap, Anti-Kecurangan, dan Kepatuhan** secara keseluruhan.
- 2) Kebijakan Terpadu:** Kebijakan Anti-Suap dan Kontrol Kecurangan harus menjadi komponen yang selaras dari **Kebijakan Kepatuhan** yang lebih luas.
- 3) Fungsi Terkoordinasi:** Fungsi kepatuhan, anti-suap, dan kontrol kecurangan memiliki tugas koordinatif yang jelas dan harus memiliki **akses langsung, otoritas, dan independensi** yang memadai.

**6. Perencanaan**  
(6.1–6.3)

**1) Sararan yang Selaras:** Menetapkan **Sasaran Kepatuhan (Compliance Objectives)** yang mencakup sasaran Anti-Suap (Anti-Bribery Objectives) dan sasaran Kontrol Kecurangan (Fraud Control Objectives), memastikan sasaran tersebut terukur dan konsisten dengan kebijakan terpadu.

**2) Perencanaan Aksi Terintegrasi:** Merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang secara efisien untuk ketiga domain dalam satu program, mengintegrasikan aksi-aksi ini ke dalam proses manajemen sistem secara keseluruhan.

**7. Dukungan**  
(7.1–7.5)

**1) Sumber Daya dan Kompetensi Terpadu:** Menyediakan sumber daya (SDM, finansial, teknologi) yang diperlukan untuk sistem manajemen terintegrasi.

**2) Pelatihan dan Kesadaran Terpadu:** Menyediakan **pelatihan dan kesadaran** yang mencakup risiko dan kebijakan Kepatuhan, Anti-Suap, dan Anti-Kecurangan kepada personel, dan juga kepada rekan bisnis berisiko tinggi.

**3) Due Diligence SDM Terpadu:** Menerapkan prosedur **due diligence** (penyaringan personel) dan meninjau bonus/insentif kinerja (performance bonuses) untuk mencegah potensi risiko suap dan kecurangan.

**4) Dokumentasi Terpusat:** Dokumentasi sistem manajemen dapat disimpan sebagai bagian dari sistem manajemen terintegrasi lainnya (misalnya, kepatuhan, keuangan, audit).

**9. Evaluasi Kinerja (9.1–9.4)**

**1) Pemantauan dan Pengukuran Terpadu:** Menentukan metrik (indikator) untuk memantau kinerja kepatuhan secara keseluruhan, termasuk efektivitas kontrol anti-suap dan kontrol kecurangan.

**2) Audit Internal Gabungan:** Melakukan audit internal secara berkala dan berbasis risiko yang memverifikasi kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen kepatuhan, anti-suap, dan kontrol kecurangan (CMS, ABMS, FCMS) secara simultan, dengan memastikan objektivitas dan imparialitas auditor.

**3) Kajian Manajemen Terpadu:** Manajemen puncak/badan pengatur meninjau sistem secara terpadu (pada interval yang direncanakan) untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas berkelanjutan, dengan mempertimbangkan masukan dari hasil audit, pemantauan, dan laporan investigasi suap/kecurangan.

**10. Peningkatan (10.1–10.2)**

**1) Peningkatan Berkelanjutan Menyeluruh:** Organisasi harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen secara keseluruhan (CMS/ABMS/FCMS).

**2) Mekanisme Tindakan Korektif Tunggal:** Menerapkan satu prosedur untuk Tindakan Nonkonformitas dan Korektif yang menganalisis akar penyebab nonkonformitas/nonkepatuhan (termasuk insiden suap dan kecurangan), mengambil tindakan untuk mencegah terulang, dan membuat perubahan yang diperlukan pada sistem manajemen terintegrasi.



Topik	Strategi Integrasi CMS, ABMS, FCMS
<b>1 Perencanaan Kontrol</b>	<p><b>Kontrol Operasional Spesifik Terpadu (ABMS/FCMS/CMS):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan, menerapkan, dan mengontrol proses yang diperlukan untuk mengendalikan ketiga domain.</li> <li>- Memastikan bahwa proses yang disediakan secara eksternal (<i>externally provided processes</i>) dikontrol untuk memitigasi risiko di ketiga domain.</li> </ul>

## 2 Pencegahan

**1. Kontrol Keuangan/Non-Keuangan (ABMS/FCMS/CMS):**

- Kontrol CMS yang diuji harus mencakup Kontrol Keuangan (ABMS) dan Kontrol Non-Keuangan (ABMS), dan selaras dengan Kontrol Internal (FCMS).
- Implementasi pemisahan tugas (ABMS/FCMS/CMS).

**2. Due Diligence Komprehensif (ABMS/FCMS):** Menerapkan proses Due Diligence tunggal untuk personel dan rekan bisnis berisiko lebih dari rendah (ABMS) dan berisiko kecurangan tinggi (FCMS). Ini mencakup Penyaringan Personel dan Peninjauan Insentif (ABMS/FCMS).

**3. Kendali Organisasi & Rekan Bisnis (ABMS):** Mewajibkan organisasi yang dikendalikan (controlled organizations) untuk menerapkan kontrol anti-suap sendiri atau ABMS organisasi. Untuk rekan bisnis non-kontrol berisiko tinggi, harus diupayakan untuk mendapatkan Komitmen Anti-Suap dan hak untuk mengakhiri hubungan (terminate) jika terjadi suap.

**4. Kontrol Khusus Risiko (ABMS/FCMS/CMS):** Mengelola Konflik Kepentingan (FCMS/ABMS/CMS) dan menerapkan prosedur Gifts & Hospitality untuk mencegah persepsi suap (ABMS).

## Topik

## Strategi Integrasi CMS, ABMS, FCMS

### 3 Deteksi

- 1. Deteksi Proaktif (FCMS/CMS):** Mengimplementasikan Analisis Data/AI (FCMS) untuk memantau indikator peringatan dini risiko suap, kecurangan, dan nonkepatuhan (CMS).
- 2. Deteksi Reaktif/Pelaporan (CMS/ABMS/FCMS):** Menetapkan satu proses Mengajukan Kekhawatiran (Raising Concerns/Whistle Blowing) yang mendorong pelaporan dengan itikad baik atas dugaan suap, kecurangan, atau kelemahan sistem. Proses ini wajib menjamin kerahasiaan dan perlindungan non-retaliasi.

### 4 Respons

- 1. Investigasi Terpadu (CMS/ABMS/FCMS):** Menggunakan satu proses Investigasi yang independen dan tanpa konflik kepentingan (CMS/ABMS) untuk semua insiden. Investigasi harus mencakup pengamanan bukti digital dan pemulihan aset/dana (FCMS).
- 2. Respons Risiko yang Tidak Dapat Dikelola (ABMS):** Jika due diligence menunjukkan risiko suap/kecurangan tidak dapat dikelola oleh kontrol yang ada, organisasi harus menunda atau menghentikan proyek/hubungan.
- 3. Peningkatan Sistem (ABMS/FCMS/CMS):** Hasil investigasi wajib dilaporkan ke fungsi anti-suap dan manajemen puncak, serta digunakan untuk menilai kembali kontrol internal (ABMS/FCMS) dan peningkatan sistem secara keseluruhan (CMS).

# Thank You!

## **ISO Center Indonesia (Jakarta)**

Permata Kuningan  
Building 17th Floor, HR  
Rasuna Said. Kuningan  
Mulia, Menteng Atas,  
Setia Budi, South  
Jakarta City, Jakarta  
12920

## **East Office (Surabaya)**

AMG Tower Lantai 17, Jl.  
Raya Dukuh Menanggal  
No 1A, East Java, Gayungan  
Surabaya, Indonesia 60234

### **Contact Us :**

Website : <https://isoindonesiacenter.com/>

email : [admin@isoindonesiacenter.com](mailto:admin@isoindonesiacenter.com)

telepon : +62 813-184-5942 (Sinthia - WhatsApp/Call)

+62 895-2956-5008 (Louqman – WhatsApp/Call)

+62 89-6551-88175 (Ardi - WhatsApp/Call)